## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku dan Jurnal

- Abdussalam, R dan Desasfuryanto, Adri. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta : Penerbit PTIK.
- Agustino, Leo. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Ahmadi, Rulam. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sleman : Ar-Ruzz Media.
- Alawiyah, Faridah. (2018). Problematika Tata Kelola Guru dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen. Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial. 9 (1) : 118-140.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2017). Indeks Pembangunan Kota Medan 2017. Medan : Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Medan 2018*. Medan : Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Creswell. John W. (2012). Educational Research : Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston : Pearson Education.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy. New Jersey : Pearson Education.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. 21(3) : 220 – 229.
- Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek.* Jakarta : Bumi Aksara.

- Harun. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif. Jurnal Law and Justice 1(1): 74 84
- Hasbullah, H.M. (2015). Kebijakan Pendidikan : Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hidayat, Dadang Rahmat dan Abdullah, Aceng. (2015). Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis. Jurnal Komunikasi 10(1): 11-21.
- Hill, Michael dan Hupe. (2002). *Implementing Public Policy*. London : SAGE Publications.
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo : UNG Press Gorontalo.
- Komara, Endang. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. Mimbar Pendidikan : Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan. 1(2) : 151-160.
- Kurniady, Dedy Achmad. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Pendidikan. 14 (1) : 174-181.
- Leba, Umbu Tagela Ibi dan Padmomartono, Sumardjono. (2014). Profesi Kependidikan. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Matnuh, Harpani. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat. 7(2) : 46-50.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mujiyono dan Feriyanto. (2017). *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Nasution, S. (2014). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nisa, Aisyah Nur Sayidatun. Fredy Hermanto. Asep Ginanjar. dan Noviani Achmad Putri. (2019). Persepsi Guru Mengenai Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di

Kota Semarang. Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKn. 3 (2). 104-114.

- Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Rahadian, A.H. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Bijak : Jurnal Ilmiah STIA Mandala Indonesia. 8 (17). 41-50.
- Rahman, Ansar. (2017). Efisiensi dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Jurnal Eklektika. 5 (2). 87-102.
- Rianawati. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak*. Raheema : Jurnal Studi Gender dan Anak. 3 (2) : 1-13.
- Sabatier, Paul dan Mazmanian, Daniel. (1980). The Implementation of Public Policy : A Framework of Analisys. Policy Studies Journal. Volume 8, Edisi 4. h. 538 – 560. ISSN : 0190-292X
- Salim, Satriwan. (2017). Guru Republik, Refleksi Kritis tentang Isu-isu Pendidikan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan. Depok : Indie Publishing.
- Setyadin, Bambang. (2014). Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Profesi Bagi Guru. Manajemen Pendidikan : Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. 24 (3) : 181-185.
- Shalihah, Fithriatus. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM. UIR Law Review : Jurnal Hukum Universitas Islam Riau. 1(2) : 149-160.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Penerbit Alfabeta.

, (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.

- Tanjung, Fahriza Marta. Alan Darmawan. Sutanto. dan Harry Surya Sirait. (2011). Laporan Survei : Gaji Guru yang Layak di Kota Medan. Tidak diterbitkan.
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, Riant. (2009). Kebijakan Pendidikan : Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Trowler, Paul. (2003). Education Policy. London : Routledge.

- Turnip, Johannes Mangapul. Budiman Ginting. Jusmadi Sikumbang dan Agusmidah. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Dosen Perguruan Tinggi Swasta yang Di-PHK. USU Law Journal : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6 (1) : 147-158.
- Uno, Hamzah B. (2012). Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan reformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2014). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2004). Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo.
- Yin, Robert K. (2014). Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zaini, Ahmad. Amrazi Zakso dan M. Syukri. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjung Pura. 3 (11) : 1-13.
- Zuraida, Ida. (2014). *Kedudukan Aturan Kebijakan dalam Hukum Positif di Indonesia*. (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19902-kedudukan-peraturan-kebijakan-surat-edaran,-instruksi,-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia)

## **Media Online**

- analisadaily.com. (2014). Perwal Wajibkan Bahasa Inggris Jadi Muatan Lokal SD. (<u>http://harian.analisadaily.com/kota/news/perwal-wajibkan-bahasa-inggris-jadi-muatan-lokal-sd/29819/2014/05/14</u> diakses 18 Juli 2019)
- finance.detik.com. (2018). *Fakta Miris Rendahnya Gaji Guru Honorer*. (<u>https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4002089/fakta-miris-rendahnya-gaji-guru-honorer</u> diakses 1 Juni 2018)
- hukumonline.com. (2012). Apakah Guru = Buruh? (<u>https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5091c63fb87a1/guru</u> -buruh-pabrik/ diakses 23 Juli 2019)
- medanbisnisdaily.com. (2019). DPRD Medan Usulkan 12 Ranperda 2019. (http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2019/01/23/366363/dprd\_m edan usulkan 12 ranperda 2019/ diakses 18 Juli 2019)
- nasional.tempo.co. (2016). *Guru Pencubit Murid di Sidoarjo Divonis 3 Bulan Penjara* (<u>https://nasional.tempo.co/read/793185/guru-pencubit-murid-di-sidoarjo-divonis-3-bulan-penjara</u> diakses 1 Juni 2018)
- nasional.tempo.co. (2016). Murid Dipukul, Guru Dianiaya Orang Tua. (<u>https://nasional.tempo.co/read/794774/murid-dipukul-guru-dianiayaorang-tua</u> diakses 1 Juni 2018)
- news.okezone.com. (2017). Empat Kasus Guru yang Dipenjarakan Orang Tua Muridnya. (<u>https://news.okezone.com/read/2017/11/24/337/1820106/</u> empat-kasus-guru-yang-dipenjarakan-orang-tua-muridnya</u> diakses 1 Juni 2018)
- regional.kompas.com. (2018). Penganiayaan Guru oleh Siswa di Sampang, Begini Kronologinya. (<u>https://regional.kompas.com/read/</u> 2018/02/03/10041991/penganiayaan-guru-oleh-siswa-di-sampang-beginikronologinya. diakses 1 Juni 2018)
- sumutpos.co. (2019). Terkait Dana Insentif Tak Dibayar 6 Bulan, Guru Honorer Lapor Ombudsman. (<u>https://sumutpos.co/2019/01/04/terkait-dana-insentif-tak-dibayar-6-bulan-guru-honorer-lapor-ombudsman/</u> diakses 18 Juli 2019)

## Peraturan dan Perundangan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor B/53/XII/2012 dan Nomor 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penanganan Perkara dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 67/ G/ 2013/ PTUN-MEDAN.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 746 K/ Pdt-Sus-PHI/ 2016.